

PENGARUH PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA

HARUNURRASYID

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

This research aims at analyzing the effect of the change of oil price (BBM) on inflation rate in Indonesia. The main data used were the change of oil price and inflation rate taking period of 34 years ranging from April 1979 to June 2013. The result of regression analysis shows that the effect of the change of oil price (BBM) on the inflation rate in Indonesia is positive. It can be concluded that an increase of the oil price by 1 % will lead to an increase of infaltion rate by 0,51%. The effect of the oil price is more dominant on the rate of inflation which is grouped in expenditures for raw materials of food, tranportation dan communication than on inflation rate of other group of expenditures.

Keyword: The Change of Oil Price (BBM) and Inflation Rate.

PENDAHULUAN

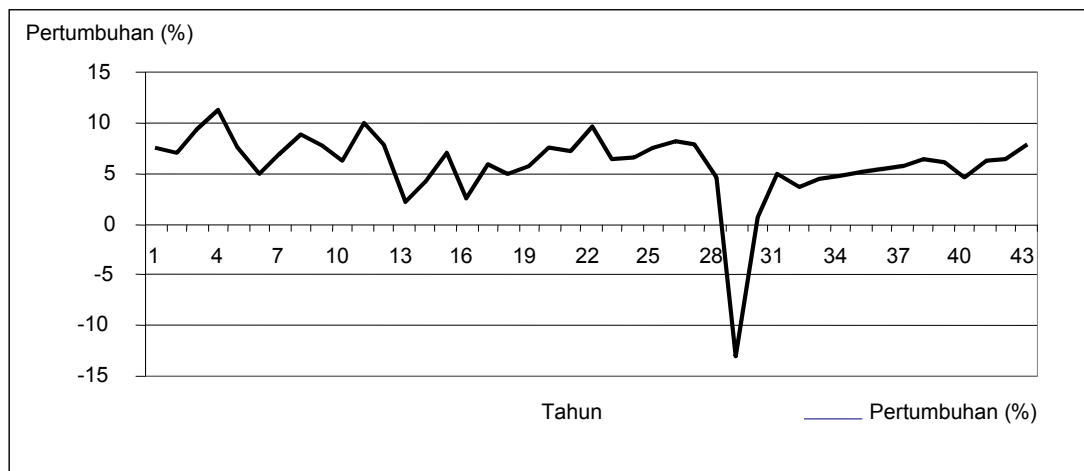
Sejak awal pemerintahan Orde Baru hingga di era Reformasi sekarang ini, perkembangan ekonomi Indonesia tampaknya selalu dipengaruhi oleh gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) dunia. Selama periode pertama, fluktuasi harga minyak dunia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada periode kedua ini, gejala kenaikan harga minyak tersebut cenderung berpengaruh pada tingkat inflasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah dicapai selama dua puluh lima tahun pembangunan Indonesia sejak tahun 1969, antara lain telah dipacu oleh melimpahnya penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi akibat naiknya harga ekspor minyak dunia. Hal itu dimungkinkan karena pangsa ekspor minyak bumi saat itu merupakan sebagian besar dari total ekspor Indonesia. Pada tahun 1970 pangsa ekspor minyak bumi masih 40,3%, terus meningkat mencapai tertinggi pada tahun 1982, sebesar 82,4 %. Menjelang reformasi, tahun 1997, pangsa ekspor minyak bumi tinggal sekitar 22% dari total ekspor Indonesia. (Dumairy, 1997, hal. 183)

Namun, setelah itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menurun seiring dengan menurunnya penerimaan ekspor minyak bumi. Selain turunnya harga minyak bumi, pangsa ekspor minyak Indonesia juga mulai menurun seiring dengan semakin berkurangnya produksi minyak bumi di negeri ini.

Selanjutnya, di masa reformasi sekarang ini gejala kenaikan harga dunia justru berpengaruh terhadap beban APBN yang menanggung subsidi terhadap konsumen bahan bakar minyak. Sehubungan dengan itu, timbul permasalahan bagi pemerintah antara pilihan menanggung subsidi yang semakin besar atau mengurangi subsidi dengan konsekuensi

meningkatnya inflasi karena naiknya harga BBM di dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian anggota OPEC, malahan sudah menjadi negara pengimpor neto terhadap bahan bakar minyak (BBM).



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1970 - 2012

Sumber: Dumairy, 1997 hal.41, dan Laporan Bank Indonesia, 2013

Selama lima tahun pertama pembangunan di era Orde Baru pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 8,56 persen per tahun (1969-1973). Pertumbuhan tertinggi sebesar 11,3% dicapai pada tahun 1973. Walaupun pada periode lima tahun kedua (1974-1978) terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 6,96 persen per tahun, namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih tergolong tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama sepuluh tahun tersebut telah didukung oleh *bonanza* (rezeki nomplok) minyak bumi yang diterima Indonesia. Kenaikan devisa ekspor minyak saat itu dipicu oleh melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik antara Arab dan Izrael, di mana negara-negara Arab anggota OPEC menghentikan ekspor ke negara-negara pendukung Izrael. Krisis energi minyak dunia tersebut terjadi pada tahun 1973. Indonesia yang saat itu masih sebagai anggota negara OPEC telah menikmati rezeki *petro dollar* tersebut. Peretumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut berlangsung hingga akhir tahun 1970-an. (Dumairy, 1997, *ibid*).

Selanjutnya, krisis minyak dunia sejak awal tahun 1970-an tersebut telah menyebabkan krisis ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan Jepang. Akibatnya, harga minyak dunia menurun drastis sejak awal tahun 1980-an. Hal itu berpengaruh pada kinerja perekonomian Indonesia. Di samping dampak krisis ekonomi dunia mulai masuk ke Indonesia, keadaannya diperparah oleh anjloknya harga minyak sehingga penerimaan ekspor berkurang drastis. Akhirnya, hal itu berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Memasuki era Reformasi, yang ditandai oleh krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1998, gejolak harga minyak dunia yang cenderung terus meningkat telah membuat pemerintah Indonesia kesulitan dalam memenuhi anggaran pembangunan. Hal ini disebabkan oleh dasar patokan APBN adalah harga minyak dunia, sementara posisi Indonesia sudah menjadi negara pengimpor bersih terhadap minyak bumi (BBM). Untuk melindungi kepentingan konsumen yang sebagian besar masih tergolong rendah, maka pemerintah terpaksa memberikan subsidi harga BBM di dalam negeri. Namun hal ini tampak semakin memperberat usaha pemenuhan keuangan pada APBN Indonesia setiap tahunnya. Untuk mengurangi beban pada APBN tersebut, pilihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengurangi subsidi BBM. Namun dampaknya cenderung menyebabkan kenaikan harga-harga umum.

Kebijakan pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM sebesar Rp.2000/liter untuk premium dan Rp. 1000/liter untuk solar pada bulan juni 2013 telah diprediksi akan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Dampak utama dari kenaikan harga BBM tersebut adalah kenaikan tarif angkutan dan biaya produksi di sektor industri, yang pada gilirannya akan meningkatkan inflasi di semua sektor ekonomi. Para ahli memperkirakan dampak kenaikan harga BBM bulan juli tersebut akan meningkatkan inflasi sekitar 2,46 persen dari target pemerintah sekitar 7,2 persen. (Kompas, Rabu 19 Juni 2013, hal.19).

Akan tetapi, bagi pihak yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan alasan bahwa alokasi subsidi BBM oleh pemerintah tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Data susenas 2008 dan Bank Dunia 2010, menunjukkan bahwa 25% rumah tangga yang berpendapatan (dan pengeluaran) tinggi justru menikmati subsidi BBM sekitar 77% per bulan. Sementara itu, 25% kelompok rumah tangga berpenghasilan (dan pengeluaran) rendah hanya menikmati alokasi subsidi BBM sekitar 15%. Alasan kedua adalah harga patokan BBM di Indonesia jauh lebih rendah dari pada harga BBM di berbagai negara, termasuk negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dari pada Indonesia. Sebagai contoh, di negara Kamboja dan Laos harga BBM telah mencapai lebih dari Rp. 13.000,- per liter. (Rafika Dwi H, 2013)

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok di dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh perubahan harga BBM terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan di Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghasilkan output (Q), setiap produsen memerlukan faktor produksi (input) yang meliputi stok modal (K), tenaga kerja (L), kekayaan alam (R), dan tingkat teknologi (T). Hubungan antara input dan output tersebut dapat dirangkum ke dalam fungsi produksi sebagai berikut:

$$Q = f(K, L, R, T) \dots\dots\dots (1)$$

Fungsi produksi di atas menggambarkan bahwa jumlah produksi (Q) dipengaruhi oleh jumlah input modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan teknologi yg digunakan. Semakin banyak jumlah input tersebut digunakan, maka semakin besar pula jumlah output yang dihasilkan.

Selanjutnya, keempat jenis input tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 komponen utama, yaitu input tetap (fixed input) dan input berubah (variable input). Sehubungan dengan pemakaian input produksi tersebut, maka terdapat biaya input yang merupakan hasil perkalian antara jumlah input yang digunakan dan harga input itu sendiri. Biaya produksi dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya berubah (variable cost). (Sukirno, 2006, hal. 195-225). Di antara *varibale cost* tersebut adalah biaya bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai implikasinya, apabila terjadi peningkatan harga input, maka biaya produksi secara otomatis juga akan meningkat. Untuk meningkatkan ataupun mempertahankan tingkat keuntungan, maka para produsen akan menaikkan tingkat harga output yang merreka hasilkan.

Teori Kebijakan Pembatasan Harga

Di dalam beberapa kasus, pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa yang ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Untuk melindungi kepentingan konsumen, pemerintah menerapkan harga maksimum (**Price Ceiling**). (Baye, 2003: 52-56)

Kebijakan **price ceiling**, dilakukan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar, karena harga pasar tersebut terlalu tinggi bagi konsumen. Dampak positifnya adalah konsumen dapat membeli produk dengan harga yang ditetapkan tersebut. Dampak negatifnya adalah dengan harga yang lebih rendah tersebut, maka permintaan akan meningkat, sementara penawaran menurun, sehingga akan terjadi kelebihan permintaan (**excess demand**). Bila excess demand tidak diatasi, maka akan terjadi praktek pasar gelap (**black market**) yang justru memicu harga aktual menjadi jauh lebih tinggi dan menyebabkan hilangnya surplus produsen dan surplus konsumen.

Agar kebijakan harga tersebut dapat berjalan secara efektif, maka pemerintah perlu menyediakan anggaran untuk menyediakan stok barang yang cukup untuk memenuhi kelebihan permintaan tersebut, atau memberikan subsidi kepada produsen agar mereka bersedia meningkatkan produksi untuk memenuhi kelebihan permintaan pasar. Dengan demikian, apabila tingkat harga keseimbangan di pasar meningkat, maka beban anggaran subsidi pemerintah juga akan meningkat. Sebagai implikasinya adalah apabila pemerintah ingin mengurangi anggaran untuk stok barang ataupun untuk subsidi kepada produsen, maka batas harga maksimum (price ceiling) tersebut perlu dinaikkan. Apabila barang yang dimaksudkan adalah barang input yang penting dalam proses produksi banyak jenis produk, maka kenaikan harga akan berdampak pada kenaikan biaya produksi barang-barang secara umum. Akhirnya hal itu bisa menimbulkan inflasi.

Teori Inflasi

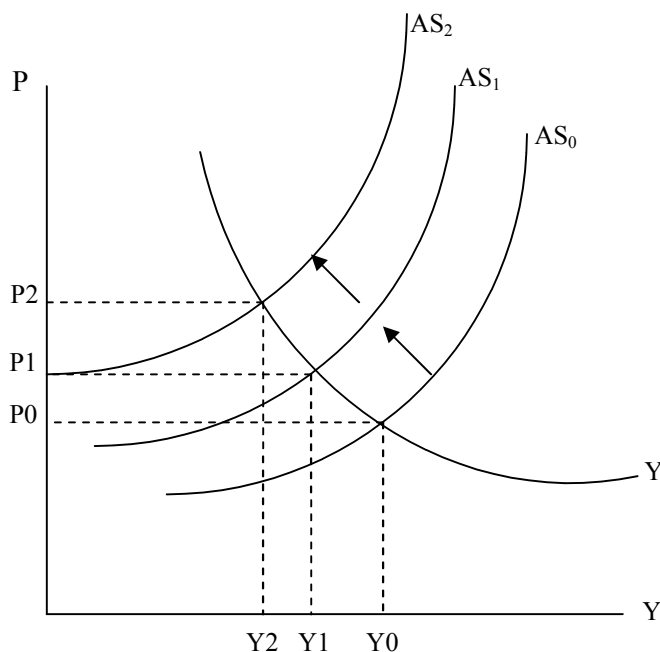
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian. Persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu periode tertentu dinamakan tingkat inflasi. Berdasarkan pada faktor-faktor penyebabnya, inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) dan inflasi desakan biaya (cost push inflation). (Sukirno, 1999, hal. 302-303)

Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) muncul ketika jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh produsen tidak sanggup mengimbangi jumlah permintaan oleh seluruh masyarakat (Aggregate Demand > Aggregate Supply). Jenis inflasi ini biasanya terjadi pada saat perekonomian dalam keadaan *full employment* disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada kondisi seperti ini, tingkat produksi seluruh perusahaan sudah mencapai kapasitas penuh, sementara permintaan masyarakat meningkat pesat. Dengan demikian terdapat kelebihan permintaan (excess demand) di pasar yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga-harga (inflasi). (Sukirno, 1999, Ibid)

Inflasi Desakan Biaya

Inflasi desakan biaya adalah suatu fenomena di mana terjadi kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi akan mendorong para produsen meningkatkan harga, meskipun mereka akan menghadapi kemungkinan penurunan permintaan terhadap produk yang mereka hasilkan. (Sukirno, 1999, ibid. hal.305). Proses terbentuknya inflasi desakan biaya tersebut dapat dilihat pada gambar 2. Pada mulanya keadaan ekonomi dalam keseimbangan, di mana kurva Aggregate Demand berpotongan dengan kurva Aggregate Supply, sehingga tercipta tingkat harga P_0 dan tingkat pendapatan nasional Y_0 . Selanjutnya, terjadi kenaikan harga-harga input produksi sehingga biaya produksi meningkat. Hal ini akan menyebabkan bergesernya kurva AS_0 menjadi AS_1 dan seterusnya menjadi AS_2 . Sebagai akibatnya, tingkat harga meningkat dari P_0 ke P_1 bahkan ke P_2 . Situasi ini dinamakan inflasi karena desakan biaya (*cost push inflation*). Cost push inflation dapat menyebabkan menurunnya pendapatan nasional dari Y_0 ke Y_1 bahkan ke Y_2 .



Gambar 2. Proses Terbentuknya Inflasi Desakan Biaya (Cost Push Inflation)

Penelitian Terdahulu

Banyak studi yang dilakukan telah menghasilkan temuan yang mengindikasikan bahwa inflasi di Indonesia cenderung disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi (cost push Inflation), di samping karena tarikan permintaan (demand pull inflation).

Penelitian yang dilakukan oleh Studi Pengembangan Indikator Ekonomi Makro (2001) mengamati perubahan nilai tukar, jumlah uang beredar dan harga BBM dalam negeri yang dijadikannya sebagai leading indikator yang cukup baik untuk menaksir laju inflasi bulanan. Penelitian ini menemukan bahwa setiap kenaikan 1% harga BBM akan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,085%.

Josep et all (1999), meneliti tentang keadaan dan reaksi kebijakan ekonomi makro selama krisis ekonomi tahun 1997-1998, menemukan bahwa nilai tukar rupiah mempengaruhi tingkat inflasi. Saat itu nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terdepresiasi dengan tajam, sehingga harga-harga input yang berasal dari impor mengalami kenaikan drastis. Akibatnya, biaya produksi meningkat pesat dan akhirnya terjadi inflasi yang begitu cepat. Pada saat itu inflasi yang terjadi adalah *imported inflation* (cost push inflation).

Fery Andrianus dan Amelia Niko (2006) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode 1997-2005, menemukan bahwa suku bunga deposito baik jangka pendek maupun jangka panjang mempengaruhi tingkat inflasi. Semakin tinggi suku bunga semakin tinggi pula tingkat inflasi.

Sehubungan dengan beberapa hasil studi di atas, sudah selayaknya dilakukan kajian lanjutan mengenai pengaruh kenaikan harga BBM terhadap inflasi dengan menggunakan rentangan waktu dan metodologi yang berbeda.

Kerangka Pikir

Berdasarkan landasar teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka diprediksikan bahwa proses terciptanya inflasi akibat perubahan harga BBM dapat digambarkan dalam suatu skema alur pikir. Skema tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan mnyebabkan kenaikan biaya produksi. Untuk meningkatkan ataupun mempertahankan tingkat keuntungan, maka para produsen harus menaikkan tingkat harga

produknya. Bila hal itu terjadi untuk harga semua produk, maka berarti inflasi meningkat (*cost push inflation*).



Gambar 3. Skema Alur Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengamati pengaruh perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis bensin (premium) terhadap tingkat inflasi di Indonesia, dengan mengambil rentangan waktu selama 34 tahun terakhir. Selama periode tahun 1979 – 2013 telah terdapat 19 kali perubahan harga BBM di Indonesia. Tingkat inflasi yang diamati akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tingkat inflasi secara keseluruhan dan tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olah raga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, dapat diketahui pengaruh perubahan harga BBM terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan dan juga terhadap beberapa kelompok inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran.

Penelitian ini menggunakan data sekunder baik data tentang harga BBM maupun tingkat inflasi. Data tersebut bersumber dari laporan Badan Pusat statistik (BPS) dan dari laporan keuangan Bank Indonesia, berbagai instansi yang terkait, majalah, internet dan surat kabar.

Untuk menganalisis permasalahan yang ada digunakan analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif menggunakan analisis tabulasi silang. Analisis kuantitatif menggunakan model ekonometrika, yaitu Ordinary Least Square (OLS). (Gujarati, D. 1995).

Metode Ordinary Least Square (OLS)

Persamaan ekonometrika dari OLS dapat dirumuskan melalui formula regresi linier sederhana seperti berikut:

$$INF = f(BBM) \dots\dots\dots (2)$$

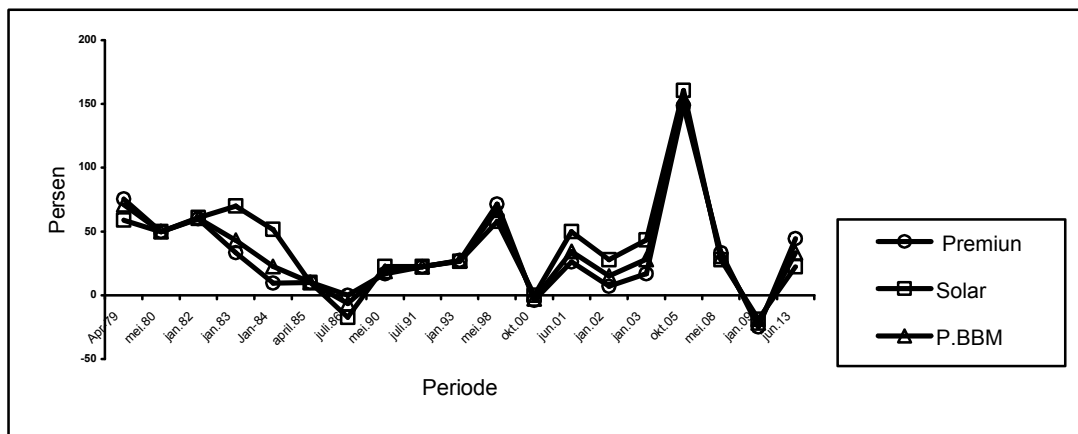
$$INF = \beta_0 + \beta_1 \text{BBMt} + e \dots\dots\dots (3)$$

Di mana: INF = Tingkat inflasi; BBMt = Perubahan harga BBM; e = *Standar Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Harga BBM

Perkembangan harga BBM di Indonesia sejak bulan April 1979 hingga Juni 2013 dapat dilihat pada gambar 4. Selama periode tersebut, tampaknya pertumbuhan harga premium dan solar menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat. Petumbuhan harga solar secara rata-rata meningkat lebih cepat dari pada harga premium. Selama periode tersebut, harga solar meningkat rata-rata 32,44 persen. Harga solar meningkat dari rp. 35/liter pada bulan April 1979 menjadi rp. 5.500/liter pada bulan Juni 2013. Sementara itu harga premium meningkat rata-rata 26,10 persen, yaitu dari rp. 100/liter menjadi rp. 6.500/liter pada periode yang sama.



Gambar 4. Perkembangan Harga BBM jenis Solar dan Premium di Indonesia April 1979 – Juni 2013

Sumber: www.bps.go.id

Walaupun tren harga kedua komoditi itu menunjukkan peningkatan, namun tingkat pertumbuhannya berfluktuasi dari waktu ke waktu. Selama periode 1979-2013, terdapat 4 titik puncak pertumbuhan harga BBM di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 50 persen, yaitu pada tahun 1979, 1982, 1998 dan tahun 2005. Pada bulan April 1979, pemerintah menetapkan harga premium dan solar masing-masing menjadi Rp.100 per liter dan Rp. 35 per liter. Bila dibandingkan dengan harga kedua komoditi itu pada bulan April 1975, maka masing-masing meningkat sebesar 75,43 persen dan 59,09 persen. Kenaikan harga BBM pada bulan Mei 1980 dengan tingkat perubahan yang lebih rendah dari periode sebelumnya, yaitu masing-masing meningkat 50 persen. Selanjutnya, kenaikan harga BBM pada bulan Januari 1982 mencapai 60 persen untuk premium dan 61 persen untuk solar. Sejak itu, perubahan harga BBM berfluktuasi dengan tren menurun hingga Januari 1993.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Mei 1998 yang masing-masing sebesar 71,43 persen untuk premium dan 57,89 persen untuk solar telah membuat keadaan perekonomian Indonesia semakin berat. Sementara perekonomian kita sedang dilanda krisis moneter yang dipicu oleh anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, peristiwa kenaikan harga BBM pada bulan Mei 1998 tersebut telah menambah faktor pemicu kerusuhan yang terjadi saat itu di hampir seluruh pelosok negeri ini. Sebagai dampak dari krisis ekonomi dan kerusuhan tersebut, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada tahun tersebut.

Pertumbuhan harga BBM cenderung menurun sejak tahun 1998 hingga tahun 2003. Bahkan pada bulan oktober 2000 pemerintah membuat kebijakan penurunan harga premium sebesar 4,17 persen dari Rp. 1.200 per liter menjadi Rp. 1.150 per liter, sementara harga solar tetap dipertahankan sebesar Rp. 600 per liter.

Kenaikan harga BBM tertinggi selama 34 tahun terakhir terjadi pada bulan Oktober 2005. Harga premium meningkat dari Rp. 1.810 menjadi Rp. 4.500 per liter atau meningkat sebesar 148,61 persen. Sementara itu, harga solar meningkat lebih tinggi, dari Rp. 1.650 menjadi Rp. 4.300 per liter atau meningkat sebesar 160,6 persen. Kenaikan harga BBM tersebut antara lain telah dipicu oleh keadaan perekonomian Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi global yang bermula dari krisis di Amerika Serikat.

Pada bulan Mei 2008, kenaikan harga BBM kembali dilakukan oleh pemerintah masing-masing sebesar 33,33 persen untuk premium, dan 27,90 persen untuk solar. Namun, pada bulan Januari 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga BBM untuk meringankan beban masyarakat. Pada waktu itu, harga premium diturunkan sebesar 25 persen, dari Rp. 6.000 per liter menjadi Rp. 4.500 per liter. Sementara itu, harga solar diturunkan sebesar 18,8 persen dari Rp. 5.500 per liter menjadi Rp. 4.500 per liter.

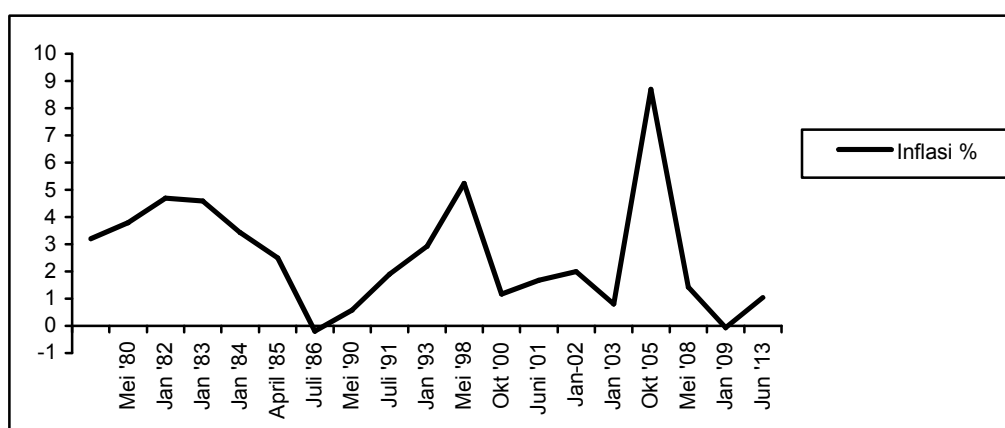
Terakhir, pada bulan juni 2013 pemerintah terpaksa meningkatkan lagi harga BBM mengingat beban subsidi pada APBN semakin membesar akibat harga impor BBM semakin tinggi. Pada masa tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an Indonesia masih bertindak sebagai bagian dari negara eksportir minyak (OPEC). Namun sejak pertengahan tahun 1990-an, Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak secara netto. Oleh karenanya, kenaikan harga minyak di pasaran dunia telah berdampak pada melonjaknya besaran subsidi pada APBN. Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM.

Perkembangan Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi menunjukkan kecenderungan meningkatnya harga-harga barang secara umum. Tingkat inflasi diukur berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK). Di dalam pembahasan penelitian ini, tingkat inflasi yang digunakan adalah data inflasi bulanan, yaitu tingkat inflasi yang terjadi pada bulan yang bersamaan dengan terjadinya perubahan harga BBM.

Selama periode 1979 hingga 2013, tampak perkembangan inflasi berfluktuasi dan mempunyai cenderung menurun. Pada bulan April 1979, saat terjadi kenaikan harga BBM, tingkat inflasi sebesar 3,20 persen. Namun, pada saat pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM pada bulan Juni 2013, ternyata tingkat inflasi hanya mencapai 1,03 persen.

Pada awal periode tersebut, April 1979 sampai dengan Januari 1984, tingkat inflasi bulanan rata-rata di atas 3 persen. Setelah itu, tingkat inflasi yang mengiringi perubahan harga BBM tersebut cenderung menurun, kecuali pada bulan Mei 1998 dan Oktober 2005. Pada bulan Mei 1998, tingkat inflasi mencapai 5,24 persen, dan pada bulan Oktober 2005 mencapai puncaknya, yaitu 8,70 persen. Secara tahunan, tingkat inflasi pada tahun 1998 mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah sejak pemerintahan ORDE baru hingga era reformasi, yaitu 77,63 persen. Tingkat inflasi tertinggi kedua terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 17,11 persen (gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan tingkat Inflasi Di Indonesia 1979-2013

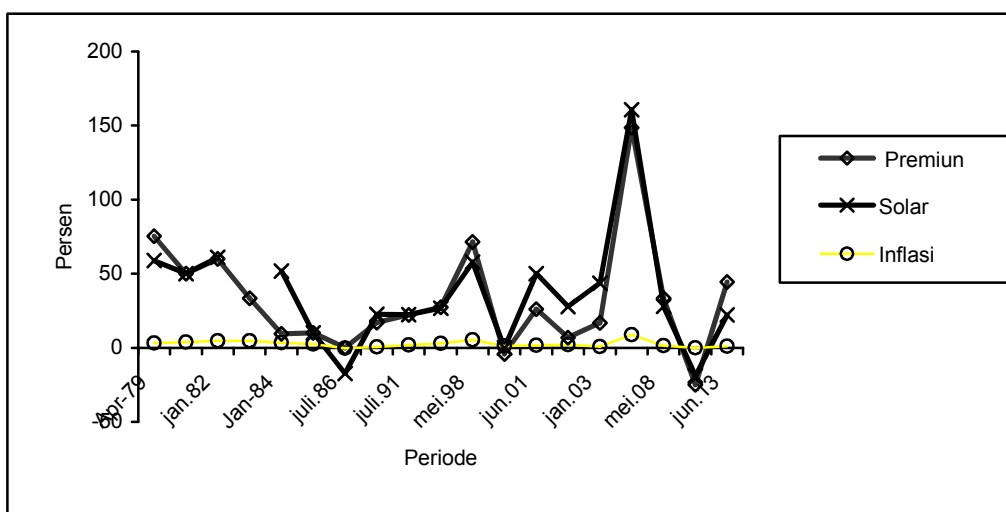
Sumber: BPS, www.bps.go.id.

Hubungan Antara Perubahan Harga BBM dan Inflasi

Sebagaimana tampak pada gambar 6, secara keseluruhan, perkembangan tingkat inflasi di Indonesia cenderung berfluktuasi dengan arah pergerakan yang mirip dengan perkembangan harga BBM.

Sejaka April 1979 hingga Juli 1986, tampak tren perubahan harga BBM dan inflasi terus menurun, dan bahkan mencapai pertumbuhan negatif pada bulan Juli 1986. pada bulan Juli 1986 pemerintah menurunkan harga BBM sebesar 17,36 persen untuk jenis solar, sementara harga premium tetap dipertahankan. Dampaknya adalah tingkat inflasi menurun, bahkan menjadi deflasi sebesar 0,2 persen. Setelah itu trennya meningkat hingga mencapai puncak pada bulan Mei 1998. Kenaikan harga premium sebesar 71,43 persen dan harga solar sebesar 57,89 persen pada waktu itu diperkirakan telah membawa peningkatan inflasi hingga menjadi 5,24 persen.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2000 harga BBM dan inflasi kembali mencapai titik terendah. Pada tahun itu harga premium turun sebesar 4,17 persen, sementara harga premium tidak berubah. Dampaknya adalah tingkat inflasi juga mencapai titik terendah, yaitu sebesar 1,16 persen. Tren perkembangan harga BBM dan inflasi meningkat kembali hingga mencapai puncak lagi pada bulan Oktober 2005. Kenaikan harga premium sebesar 148,61 persen dan harga solar sebesar 160,60 persen pada waktu itu diperkirakan telah membawa peningkatan inflasi hingga menjadi 8,70 persen. Pada bulan Januari 2009, baik perubahan harga BBM maupun tingkat inflasi sma-sama kembali mencapai titik terendah. Pada waktu itu harga premium turun 25 persen dan harga solar turun 18,80 persen. Keadaan itu lalu diikuti oleh tingkat inflasi yang negatif atau deflasi sebesar 0,07 persen. Keadaan terakhir, pada bulan Juni 2013, pemerintah menaikkan harga premium sebesar 44,44 persen dan solar sebesar 22,22 persen, sehingga tingkat inflasi juga meningkat menjadi 1,03 persen.



Gambar 6. Perkembangan harga BBM dan Inflasi di Indonesia Tahun 1979-2013

Sumber: www.bps.go.id

Selanjutnya, inflasi di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu: 1) Kelompok bahan makanan (BM); 2) Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau (MJMT); 3) Kelompok perumahan (P); 4) Kelompok sandang (S); 5) Kelompok Kesehatan (K); 6) Kelompok pendidikan dan olah raga (PO); dan 7) Kelompok transportasi dan komunikasi (TK).

Perubahan harga BBM pada tabel 1 merupakan modifikasi dari data harga premium dan harga solar. Di mana harga kedua jenis BBM itu disatukan, lalu dihitungkan persentase perubahannya. Pada awalnya, penelitian ini merencanakan untuk menyajikan data inflasi menurut kelompok pengeluaran dengan rentangan waktu 1979-2013. Akan tetapi, data hanya tersedia untuk 3 tahun, yaitu dari 2008, 2009 dan 2013. Dengan demikian, data tersebut tidak bisa digunakan untuk keperluan regresi. Namun demikian, penulis mencoba untuk

menganalisisnya secara kualitatif dengan mengamati tren perkembangan selama 3 tahun tersebut.

Tabel 1. Hubungan Antara Perubahan Harga BBM dan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, Mei 2008 – Juni 2013

Bulan/ Tahun	Perubahan Harga BBM (%)	Inflasi BM	Inflasi MJMT	Inflasi P	Inflasi S	Inflasi k	Inflasi PO	Inflasi TK
Mei 2008	30,68	1,72 (1,17)	0,86 (0)	1,58 (-0,04)	0,16 (0,11)	0,69 (-1,19)	0,37 (0,24)	2,23 (3,41)
Jan 2009	-21,74	0,76 (-2,05)	0,95 (0,59)	0,06 (-0,15)	0,55 (-0,5)	0,37 (0,21)	0,12 (0,05)	-2,57 (-2,32)
Juni 2013	33,33	1,17 (2,0)	0,67 (0,32)	0,21 (-0,54)	-1,22 (-0,09)	0,23 (0)	0,04 (-0,02)	3,80 (3,75)

Sumber: BPS, Data diolah.

Data ini mengindikasikan bahwa perubahan harga BBM cenderung berpengaruh lebih dominan terhadap tingkat inflasi pada kelompok bahan makanan, dan kelompok transportasi dan komunikasi dari pada terhadap kelompok pengeluaran yang lainnya. Angka dalam tanda kurung menunjukkan tingkat perubahan inflasi dari bulan sebelum dilakukan perubahan harga BBM.

Pada bulan Mei 2008, seiring dengan terjadi perubahan harga BBM sebesar 30,68 persen, tampak perubahan tingkat inflasi pada kelompok bahan makanan meningkat sebesar 1,17 poin dibandingkan dengan tingkat inflasi pada bulan April 2008. Begitu juga dengan tingkat inflasi pada kelompok transportasi dan komunikasi meningkat 3,41 poin dibandingkan dengan data pada bulan sebelumnya. Tingkat inflasi kelompok sandang, dan kelompok pendidikan dan olahraga, masing-masing cuma naik 0,11 poin dan 0,24 poin. Sebaliknya inflasi pada kelompok perumahan dan kesehatan justru menurun, masing-masing 0,04 poin dan 1,19 poin. Sementara inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau tidak mengalami perubahan.

Penurunan harga BBM pada bulan Januari 2009 sebesar 21,74 persen telah berpengaruh terhadap penurunan tingkat inflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,05 poin dan penurunan pada inflasi kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 2,32 poin, kelompok perumahan 0,15 poin, dan kelompok sandang sebesar 0,5 poin. Sebaliknya, inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau, kelompok kesehatan, dan kelompok pendidikan dan olah raga justru mengalami peningkatan. Fenomena pada bulan Juni 2013, juga mengisyaratkan pengaruh perubahan harga BBM yang berpengaruh lebih dominan terhadap inflasi pada kelompok bahan makanan, dan kelompok transportasi dan komunikasi.

Hasil Regresi Antara Perubahan Harga BBM dan Inflasi

Regresi antara variabel independen perubahan BBM pada bulan yang bersangkutan; harga premium (PPt) dan harga solar (PSt) dan variabel dependen tingkat inflasi pada bulan yang sama (INFt) di Indonesia, dengan mengambil rentangan waktu dari April 1979 hingga Juni 2013, dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{INFt} = \beta_0 + \beta_1 \text{PPt} + \beta_2 \text{PSt} + e$$

Di mana: INFt = Tingkat inflasi pada bulan yang sama (dalam %); PPt = Perubahan harga Premium (dalam %); PSt = Perubahan harga Solar (dalam %); dan β_0 , β_1 dan β_2 = bilangan konstanta yang akan ditaksir

Hasil regresinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{INF}_t &= 0,682 + 0,08 \text{ PPt} + 0,043 \text{ PSt} \\ \text{t-hitung} & \quad (2,105) \quad (0,700) \quad (3,529) \\ R^2 &= 0,814 \\ F &= 34,954 \\ \text{DW} &= 1,596 \end{aligned}$$

Hasil regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa pengaruh perubahan harga BBM jenis Premium terhadap inflasi selama periode pengamatan sebesar 0,08. Artinya setiap terjadi kenaikan harga premium sebesar 1 persen akan mendorong kenaikan tingkat inflasi sebesar 0,08 persen. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal itu terlihat dari nilai t-hitung sebesar 0,700 lebih rendah dari pada t-tabel dan tingkat probability uji $t = 0,494 > \alpha = 0,05$. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh karena premium sebagian besar dikonsumsi oleh kendaraan pribadi yang cenderung tidak berhubungan langsung dengan biaya produksi di sektor industri dan jasa angkutan.

Sebaliknya, perubahan harga solar tampak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hal itu terlihat dari nilai t-hitung = 3,529 lebih besar dari pada t-tabel, dengan signifikansi/probabilitas $0,03 < \alpha = 0,05$. Artinya, setiap terjadi kenaikan harga solar sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,043 persen. Hal ini antara lain karena harga solar berhubungan langsung dengan biaya produksi di sektor produksi barang dan juga produksi jasa di sektor transportasi.

Pengaruh kedua variabel secara bersamaan terhadap inflasi tampak relatif besar. Dilihat dari nilai $R^2 = 0,814$, berarti variabel perubahan harga premium dan solar mampu menjelaskan perubahan tingkat inflasi sebesar 81,4 persen. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Berdasarkan nilai DW sebesar 1,596, secara *rule of the thumb* model tersebut tidak mengalami masalah autokorelasi. Akan tetapi, nilai korelasi (R) di antara kedua variabel independen sebesar 0,868. Hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas di antara kedua variabel independen tersebut (perubahan harga premium dan solar).

Untuk mengatasinya, maka data harga premium dan solar digabungkan menjadi satu yaitu harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kemudian dihitung persentase perubahannya, lalu diregresikan dengan tingkat inflasi yang terjadi pada bulan yang bersamaan dengan terjadinya perubahan harga BBM tersebut. Dengan demikian, model regresi disesuaikan menjadi model regresi linier sederhana seperti berikut ini:

$$\text{INF}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{ P.BBM}_t$$

Di mana: INF_t = Tingkat inflasi pada bulan yang sama; P.BBM_t = Perubahan harga BBM, yang sudah dimodifikasi dengan cara menjumlahkan harga premium dan harga solar; dan β_0 dan β_1 = bilangan konstanta yang akan ditaksir

Hasil regresinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{INF}_t &= 0,831 + 0,051 \text{ P.BBM} \\ \text{t-hitung} & \quad (2,543) \quad (7,884) \\ R^2 &= 0,785 \\ R &= 0,886 \end{aligned}$$

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga BBM (P.BBM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi. Keadaan tersebut didasarkan pada nilai koefisien $\beta_1 = 0,051$ dengan nilai t-hitung sebesar 7,884, dan dengan tingkat probability uji t

$= 0,000 < \alpha = 0,05$. Artinya, apabila terjadi kenaikan harga BBM sebesar 1 persen, maka hal itu akan menyebabkan peningkatan inflasi sebesar 0,051 persen. Sementara nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,785, mengisyaratkan bahwa sekitar 78,5 persen dari fluktuasi tingkat inflasi dapat dijelaskan oleh fluktuasi harga BBM.

PENUTUP

Kesimpulan

Perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal itu terlihat dari nilai koefisien $\beta_1 = 0,051$ dengan nilai t-hitung sebesar 7,884 dan dengan tingkat probabilitas uji $t = 0,000 < \alpha = 0,05$. Artinya, apabila terjadi kenaikan harga BBM sebesar 1 persen, maka hal itu akan menyebabkan peningkatan inflasi sebesar 0,051 persen. Sementara nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,785, mengisyaratkan bahwa sekitar 78,5 persen dari fluktuasi tingkat inflasi dapat dijelaskan oleh fluktuasi harga BBM.

Perubahan harga BBM cenderung lebih besar dampaknya terhadap inflasi pada kelompok bahan makanan, dan kelompok transportasi dan komunikasi dari pada terhadap kelompok pengeluaran lainnya.

Saran-Saran

1. Untuk mendapat hasil yang lebih sempurna, perlu diadakan kajian lebih lanjut dengan mengikut sertakan semua jenis bahan bakar minyak, dan dengan rentangan waktu yang lebih banyak.
2. Penelitian juga akan lebih representatif jika dilakukan dengan mengadakan perbandingan kondisi antar propinsi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrianus, Fery dan Amelia Niko. 2005. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Periode 1997:3 – 2005:2” Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 11 No. 2, agustus 2006 Hal: 173-186
- Arifin dan Syamsul. 1998. “Efektifitas Kebijakan Suku Bunga dalam rangka Stabilisasi Rupiah di masa Krisis”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Edisi Desember, Bank Indonesia, Jakarta.
- Baye, Michael R. 2003. Managerial Economics and Business Strategy. Mc. Graw-Hill. New York
- Badan Pusat Statistik. “Data Inflasi dan IHK”, www.bps.go.id
- Branson, William H. 1989. Macroeconomics Theory And Policy. Third Edition. Harper & Row, Publishers, Singapore.
- Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gujarati, D. 1995. Basic Econometrics, 3rd. Eds, Mc Graw-Hills Int Eds
- H, Rafika Dwi. 2013. “Menyikapi Permasalahan Kenaikan Harga BB”. PUSAT DATA & PENELITIAN Unit Kajian Dan Penelitian HMI MPO FE UII, Yogyakarta.
- Joseph, C, Hartawan, A dan Mochtar, F. 1999. “Kondisi dan Respon Kebijakan Ekonomi Makro selama Krisis Ekonomi 1997-1998”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Edisi September 1999, Bank Indonesia, Jakarta.

Laporan Studi Pengembangan Indikator Ekonomi Makro. 2001. Pergerakan Kurs dan Uang Beredar sebagai Leading Indikator Inflasi. Jakarta.

_____. "Inflasi Bisa Lebih Dari 7,2%". *Harian Kompas*, Rabu 19 Juni 2013, Hal. 19.

_____. "Premium Rp. 6.500 Solar Rp. 5.500". *Harian Sriwijaya Post*, Sabtu 22 Juni 2013, Hal. 1

Sukirno, Sadono. 1999. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Kedua. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2006. Pengantar Teori Mikroekonomi. Edisi Ketiga. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.